

**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH, *VALUE FOR MONEY* DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Reka Yanti

1712120016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG**

2021



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dibaca dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada dipundak saya.

Bandar Lampung, 17 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Reka Yanti
1712120016

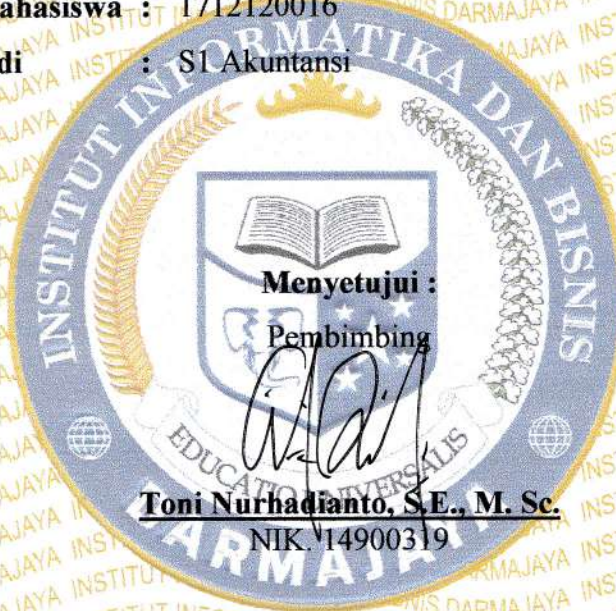
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,
VALUE FOR MONEY DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Nama Mahasiswa : **REKA YANTI**

No. Pokok Mahasiswa : **1712120016**

Program Studi : **SI Akuntansi**



Menyetujui :
Pembimbing

Toni Nurhadianto, S.E., M. Sc.
NIK. 14900319

Ketua Jurusan,

Toni Nurhadianto, S.E., M. Sc.
NIK. 14900319

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diselenggarakan Sidang Skripsi dengan judul **PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, VALUE FOR MONEY DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah).**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI**, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **REKA YANTI**

No. Pokok Mahasiswa : **1712120016**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Dan telah dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

Nama Status Tanda Tangan

1. Reva Meiliana, S.E., M.Acc, Ak Penguji 1 

2. Taufik, S.E., M.S.AK Penguji 2 

Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomi IIB Darmajaya


Dr. Faurani / Santi Singagerda, S.E., M.Sc
NIK. **30040419**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 September 2021**

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

- a. Nama : Reka Yanti
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Panjang, 20 Februari 1999
- c. Agama : Islam
- d. Alamat : Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung
Lampung Selatan
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Email : rekay1999@gmail.com
- g. No. Hp : 08974941841

2. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN 1 RANGAI TRI TUNGGAL
- b. SMP : SMPN 30 BANDAR LAMPUNG
- c. SMA/SMK : SMK UTAMA BANDAR LAMPUNG

Demikian ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar.

Bandar Lampung, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,

Reka Yanti

1712120016

PERSEMBAHAN

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala anugrah dan kasih sayangnya yang sangat melimpah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan kepada :

Kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibuku Tercinta yang sangat aku sayangi, terima kasih atas do'a, kasih sayang, bimbingan, semangat serta kesabaran yang telah diberikan kepadaku dan yang tak pernah bosan mengajarkanku apa arti dari perjalanan hidup ini. Kalian pahlawan serta bagian hidupku.

Terimakasih kepada Kakak kakakku, serta Adik ku yang aku sayang. Dan Keluarga Dekat yang selalu memberiku dukungan dan mewarnai hidupku dengan penuh tawa dan canda kalian.

Untuk keluarga besarku, sahabat dan teman – teman yang tidak dapat satu persatu saya sebutkan. Terima kasih atas dukungannya untuk menyelesaikan penelitian ini,

Dan

Para Pendidik dan Almamaterku Tercinta IIB Darmajaya

MOTTO

“Allah SWT. Tidak pernah tidur, jangan pernah remehkan ibadahmu dan jangan pernah goyahkan imanmu, beribadahlah sebelum terlambat selagi di beri waktu.”

(Amelie Hayati)

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu"

(Ali bin Abi Thalib)

"Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga"

(Abduraahman Wahid)

"Jika kamu ingin menggapai mimpi-mimpimu maka teruslah bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpimu itu."

(Reka Yanti)

"Rintangan bukan untuk menghentikanmu. Jika Anda bertemu tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari cara untuk memanjatinya, menembusnya atau memutarinya."

(Michael Jordan)

“ Hidup Harus Bermanfaat Untuk Orang Lain, Jadi Jangan Marah
Jika diManfaatkan “

(HEL JEFRI)

“Jangan takut, hadapilah dan jadilah dirimu sendiri.”

(Shelna Althea)

“Jangan mengandalkan apa yang orang lain katakan untuk apa yang kamu lakukan. Pegang teguh dan lakukan sesuai keinginanmu. Kita hidup di dunia di mana harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan.”

(Sarah R.F)

**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH, *VALUE FOR MONEY* DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

ABSTRAK

Reka Yanti

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja *value for money* dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah. Teknik yang di tentukan untuk pengumpulan data sampel penelitian ini *Convenience Sampling* dengan menyebarkan kuesioner yang akan di tunjukan kepada pihak yang terkait untuk dapat mengetahui data yang ingin diketahui dan menganalisa jawaban dari responden untuk mengetahui pengaruh di dalam penelitian ini. Dengan menyebar 72 kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji koefisien determinan, uji F dan uji T. Hasil dalam penelitian ini (1) Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Ekonomi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (3) Efisiensi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (4) Efektivitas kinerja *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (5) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, value for money, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**THE EFFECT OF EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT INTERNAL
CONTROL SYSTEM, VALUE FOR MONEY AND FINANCIAL REPORT
ACCESSIBILITY ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
ACCOUNTABILITY**

ABSTRACT

Reka Yanti

This study was conducted to find the effect of the effectiveness of the internal control system government, value for money performance and accessibility of financial statements on the accountability of regional financial management in all Regional Apparatus Organizations (Indonesian: *Organisasi Perangkat Daerah* (OPD)) Central Lampung Regency. The technique sampling for collecting the data in this study was Convenience Sampling by distributing questionnaires to the parties concerned to be able to find out the data needed and to analyze the answers of respondents to determine the effect in this study, by spreading 72 questionnaires. The method of data analysis used the test determinant coefficient, F test and T test. The results in this study (1) System effectiveness government internal control had no significant effect on the accountability regional financial management. (2) Economic performance value for money had an effect significant on the accountability of regional financial management. (3) Performance efficiency value for money had a significant effect on the financial management accountability area. (4) The effectiveness of value for money performance had no significant effect on the accountability of regional financial management, and (5) accessibility of financial reports had a significant effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: The Effectiveness of The Government Internal Control System, Value For Money, Accessibility of Financial Reports, Accountability of Financial Management Area

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah *rabbi'l'aalamiin*, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya, serta yang telah memberikan kemampuan, kekuatan dan jalan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semata-mata adalah Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik - baiknya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Firmansyah YA, MBA., MSc, selaku Rektor IIB Darmajaya.
2. Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, Dr. RZ. Abdul Aziz, ST.,MT
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ronny Nazar, SE,M.M.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya, Muprihan Thaib, S.Sos,M.M.
5. Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomi IIB Darmajaya, Dr. Faurani I Santi Singagerda, S.E., M.Sc
6. Ketua Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya Toni Nurhadianto, S.E., M. Sc
7. Bapak Toni Nurhadianto, S.E., M. Sc selaku dosen Pembimbing Skripsi.
8. Ibu Reva Meliana.,S.E.,M.Acc,Ak selaku dosen Penguji 1.
9. Bapak Taufik.,S.E.,M.S.AK selaku dosen Penguji 2.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar terutama jurusan Akuntansi yang telah membagi ilmu dan pengetahuan mereka yang bermanfaat kepada penyusun dalam pembelajaran.
11. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data dan lain-lain.

12. Untuk orang tua-ku, kakak dan adik-ku yang selalu memberikan senyum dan canda tawa di setiap lelahku dan di setiap harinya memberikanku motivasi agar Penulis bisa menyelesaikan studi di Jurusan S1 Akuntansi.
13. Para Sahabatku dan Teman-temanku yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu baik sahabat di rumah, dan di kampus yang selalu menemaniku dengan canda dan tawa dari awal kuliah sampai lulus kuliah semoga kita sukses bersama.
14. Ter-khususnya untuk yang telah memberikanku semangat dan menemaniku dalam suka dan duka mengerjakan skripsi
15. Seluruh angkatan Akuntansi 2017 yang selalu mendukung dan selalu bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan tugas skripsi serta seluruh pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Almamaterku IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Semua ini tidak luput dari keterbatasan penulis, terutama dalam membuat suatu karya tulis. Adanya kekurangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya kritik serta saran dari berbagai pihak dan hal ini memang sangat penulis harapkan sehingga akan lebih memberikan pengetahuan kepada penulis yang jauh lebih baik untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 25 November 2021

Penulis,

Reka Yanti
1712120016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Teorits	6
1.5.2 Manfaat Praktis	6
1.6 Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori <i>Stewardship</i>	8
2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	9
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	10
2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	10
2.3 Efektivitas Sisitem Pengendalian Internal Pemerintah	11
2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	11
2.3.2 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	12

2.3.3	Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	12
2.3.4	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	13
2.4	Kinerja <i>Value For Money</i>	13
2.4.1	Pengertian Kinerja	13
2.4.2	Pengertian <i>Value For Money</i>	14
2.4.3	Pengertian Ekonomi Dalam Kinerja <i>Value For Money</i>	14
2.4.4	Pengertian Efisiensi Dalam Kinerja <i>Value For Money</i>	15
2.4.5	Pengertian Efektivitas Dalam Kinerja <i>Value For Money</i>	15
2.5	Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	16
2.5.1	Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan	16
2.6	Penelitian Terdahulu	17
2.7	Kerangka Pemikiran	20
2.8	Bangunan Hipotesis	21

BAB III METODE PENELITIAN26

3.1	Sumber Data	26
3.2	Metode Pengumpulan Data	26
3.3	Populasi Dan Sampel	26
3.3.1	Populasi	27
3.3.2	Sampel	28
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel	28
3.4.1	Variabel Penelitian	29
3.4.2	Devinisi Operasional Variabel	30
3.5	Metode Analisis Data	33
3.5.1	Analisis Deskriptif	34
3.5.2	Uji Kualitas Data	35
3.5.2.1	Uji Validitas	35
3.5.2.2	Uji Reliabilitas	35
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	35
3.5.3.1	Uji Normalitas	35
3.5.3.2	Uji Multikolonieritas	36

3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	36
3.5.4	Analisis Regresi	36
3.6	Pengujian Hipotesis	37
3.6.1	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	37
3.6.2	Uji F.....	37
3.6.3	Uji T.....	37
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Deskripsi Data	38
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	38
4.2	Hasil Analisi Data	42
4.2.1	Statistik Deskriptif	42
4.2.2	Uji Kualitas Data	44
4.2.2.1	Uji validitas	44
4.2.2.2	Uji reliabilitas	46
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3.1	Uji Normalitas	46
4.2.3.2	Uji Multikolonieritas	47
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas	48
4.2.4	Analisis Regresi Linier.....	49
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis	50
4.3.1	Uji Koefisien Determinan (R^2)	50
4.3.2	Uji F	50
4.3.3	Uji T	51
4.4	Pembahasan	54
4.4.1	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	54
4.4.2	Pengaruh Ekonomi Dalam Kinerja <i>Value For Money</i> Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	54
4.4.3	Pengaruh Efisiensi Dalam Kinerja <i>Value For Money</i> Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	55

4.4.4	Pengaruh Efektivitas Dalam Kinerja <i>Value For Money</i> Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	56
4.4.5	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN58

5.1	Simpulan	58
5.2	Keterbatasan	59
5.3	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Populasi Dan Sampel	27
Tabel 3.2	Skor Skala Likert	34
Tabel 4.1	Data Hasil Kuesioner	38
Tabel 4.2	Karakteristik Berdasarkan Usia	39
Tabel 4.3	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.4	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan	40
Tabel 4.5	Karakteristik Berdasarkan Bidang Pendidikan	41
Tabel 4.6	Karakteristik Berdasarkan Pengalaman	42
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolonieritas	47
Tabel 4.12	Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4.13	Hasil Analisis Regresi Linier	49
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	50
Tabel 4.15	Hasil Uji F	51
Tabel 4.16	Hasil Uji T.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	20
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban menyelenggarakan akuntansi (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1) mewajibkan Menteri Keuangan/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran untuk transaksi pembiayaan yang perhitungannya serta transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya masing-masing (Perdana, 2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik (Wahyuni dkk, 2014). Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2002). Reformasi dan regulasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Perdana, 2019). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kinerja di instansi pemerintah (Iclas dkk, 2014). Penerapan sistem pengendalian Internal yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan serta penyimpangan dana dan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan (Mahmudi, 2010). Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah pasal 3 No. 60 Tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah (Perdana, 2019). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses atau kegiatan yang dilakukan terus menerus tindakan pada proses yang integral untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui proses ataupun kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara dan keunggulan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembukuan atas transaksi yang terjadi dilakukan dengan penyajian laporan keuangan daerah yang mengacuh pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Perdana, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang diperbarui dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, tercapainya akuntabilitas publik dan kinerja sektor publik dapat di dukung dengan penerapan konsep *Value For Money*, (Primayani dkk, 2014). Seiring dengan isu yang berkembang mengenai sektor publik menjadi sumber kebocoran dana, pemborosan dan institusi yang selalu merugi, membuat pemerintah menerapkan konsep *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2002).

Aksesibilitas dalam sebuah laporan keuangan merupakan akses mudah untuk seseorang memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Kemudahan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada para stakeholder yaitu kriteria yang menentukan tingkatan akuntabilitas keuangan daerah tersebut (Somad, 2016). Suatu informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, pemerintah daerah perlu meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya agar tidak hanya sekedar menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi juga memfasilitaskan masyarakat luas mengetahui atau mengakses laporan keuangan dengan mudah. Pemerintah daerah

harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasi laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Aliyah dan Nahar, 2012).

Kabupaten Lampung Tengah sendiri telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut sejak tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan daerah kabupaten lampung tengah. Opini BPK merupakan salah satu ukuran kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga dapat di katakan kinerja keuangan kabupaten lampung tengah sudah baik. Disisi lain yang di katakan oleh Andri Yogama selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung, bahwa masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan diharapkan diperbaiki sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. BPK juga berharap Kabupaten Lampung Tengah bisa mendorong lagi agar mencapai persentase penilaian 85% karena saat ini lampung tengah telah mencapai penilaian 79%. (www.lampungengahkab.go.id)

Fenomena yang dapat diamati dalam kasus diatas menunjukkan bahwa masih ada yang harus di perbaiki dan di teliti agar bisa lebih baik lagi. Maka dari itu tujuan peneliti ingin meneliti di kabupaten lampung tengah yang telah mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sudah mendapatkan tiga kali berturut-turut penghargaan WTP dari BPK-RI. Tentunya peneliti ingin mengetahui apakah benar atau tidak suatu laporan keuangan sudah transparan dan juga apakah karyawan yang bekerja di organisasi perangkat daerah menyetujui atau tidak untuk membuka akses laporan keuangan untuk publik. Perkembangan sektor publik semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pembelian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan saat ini yaitu tidak patuhnya pada peraturan perundang-undang yang berakibat finansial, dimana negara dapat mengalami kerugian yang sangat besar oleh karena itu Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi kinerja. Untuk mewujudkannya dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, maka dari itu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Berdasarkan fenomena di atas alasan peneliti ingin melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah kabupaten lampung tengah. Dengan meneliti efektivitas sistem pengendalian internal untuk memantau efektif jalannya pemerintahan, penerapan konsep kinerja *value for money* untuk mengukur kinerja pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk memberikan akses dan fasilitas untuk masyarakat luar agar dapat mengetahui isi dalam laporan keuangan, dan mengetahui pengeluaran atau pemasukan. perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian ini menambah variabel independen yang di ambil dari penelitian Septa Purwaningrum (2018), alasannya karena di dalam pemerintahan sangat perlu untuk memberikan akses kepada masyarakat agar mengetahui isi dalam laporan keuangan Pemerintahan, penelitian ini mengacu pada Esa Putra Perdana (2019). Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kinerja Value For Money, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*** “

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja *value for money* dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah. Objek pada penelitian ini difokuskan kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian/Bidang dan Staff yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun bekerja di OPD Kabupaten Lampung Tengah. Waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan juni tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah ini berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah pengaruh ekonomi dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah pengaruh efisiensi dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah pengaruh efektifitas dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah pengaruh aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh ekonomi dalam kinerja *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh efisiensi dalam kinerja *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh efektivitas dalam kinerja *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan atau motivasi untuk menerapkan konsep efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja *value for money*, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja *value for money*, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi para pembaca dan juga memberikan motivasi untuk ikut meneliti ulang di daerah yang lain. Maka dari itu peneliti berharap untuk memberikan contoh agar banyaknya daerah di Indonesia menerapkan konsep efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja *value for money*, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB IPENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASANTEORI: Bab ini berisi tentang landasan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam pembuatan penelitian dan hipotesis, serta didalam bab ini terdapat kerangka penelitian yang menjelaskan garis besar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tentang penentuan sampel dan populasi dalam penelitian ini, sumber data serta teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini menjelaskan hasil dari analisis data yang dilakukan berupa hasil perhitungan dan pembuktian penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN : Bab ini mengemukakan kesimpulan atas penelitian ini, keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini yaitu bagian dari *agency theory* adalah *Stewardship theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan kepentingan *stewardship* tidak sama dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *stewardship* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan. Teori *stewardship* manajer yang akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan selalu bertindak dengan keinginan prinsipal (Wahida, 2015).

Teori *stewardship* juga dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku yang memberitahu tentang jangka panjang kelompok dan pribadi, atas tujuan pribadi tersebut adalah pelayanan kepentingan pribadi seseorang. Pekerjaan individu merupakan suatu pertanggungjawaban pada kegiatan yang dilakukan dan berpengaruh dalam kegiatan kepentingan jangka pendek suatu kelompok. Teori ini dapat membantu pegawai atau aparatur pemerintah dalam menjalankan kegiatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah selaku *steward* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurniawati, 2016).

Pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan terhadap masyarakat. Asumsi hubungan yang terkait antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Stewardship* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan dengan fungsi kegunaan yang maksimal. Asumsi *stewardship* adalah manajer melakukan pelurusan sesuai tujuan pemilik. Namun tidak berarti *stewardship* tidak mempunyai kebutuhan hidup (Wahida, 2015).

Menurut Pramudita (2017) menyatakan bahwa Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi dan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewardship* yaitu manajemen dan auditor internal mengarahkan semua kemampuan dan keahlian dalam mengefektivitas pengendalian internal pemerintah, kinerja value for money dan aksesibilitas laporan keuangan untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan dapat mengaksesnya dan memberikan nilai untuk mengetahui kualitasnya.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2009) menyebutkan akuntabilitas publik adalah: Akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan penanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta penanggungjawaban tersebut. Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam menjalankan aktivitasnya atau tanggungjawabnya.

2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Abdul Halim (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusun dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.

Menurut Nordiawan (2010) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Output* dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berupa keuangan daerah dapat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) yang merupakan hasil laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pada suatu pemerintah daerah dalam waktu satu periode.

Bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas aktivitas yang dilakukannya dalam mengelola keuangan daerah, dengan mengeluarkan *output* LAKIP. Pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial akan disalurkan kepada masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pertemuan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

2.3 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah: “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permenpan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Mulyadi (2016), menyebutkan bahwa Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan guna menjadi aset organisasi, mengecek ketelitian, dan kendala data akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Arens (2011), pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen.

2.3.2 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam Agoes (2017) menyebutkan keterbatasan dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:

- a. Kesalahan, mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan dan kesalahan yang sifatnya sederhana.
- b. Kolusi, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian internal.
- c. Manfaat dan biaya, biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang pengendalian internal, mengukur secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut.

2.3.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi:

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara.
- b. Kendala pelaporan keuangan.
- c. Pengamanan Aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikaitkan efektif bila tujuan entitas tercapai, yaitu laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi.

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya Mardiasmo (2004). Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan pengendalian internal dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan suatu organisasi ditetapkan oleh pihak manajemen melalui penerapan sistem pengendalian internal.

2.4 Kinerja Value For Money

2.4.1 Pengertian Kinerja

Mahsun (2009), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah diterapkan. Dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kepada pihak tertentu bagaimana pencapaian hasil dari program atau kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah di tentukan.

2.4.2 Pengertian *Value For Money*

Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja terpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E, yaitu :

- a. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya.
- b. Efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, dan
- c. Efektifitas artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan saran.

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas, Mardiasmo(2002).

2.4.3 Pengertian Ekonomi Dalam Kinerja *Value For Money*, adalah sebuah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Ekonomi sering disebut dengan kehematan, mengelola secara hati-hati dengan cermat (*prudence*) dan tidak memiliki pemborosan. Kegiatan operasional dapat di katakan ekonomis jika menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Ekonomi juga memperoleh *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan dan ekonomi merupakan pengukuran yang relatif.

2.4.4 Pengertian Efisiensi Dalam Kinerja *Value For Money*, pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi diukur menggunakan rasio antara output dan input, semakin besar output di bandingkan dengan input, maka akan semakin tinggi tingkat efisien didalam suatu organisasi (Mardiasmo 2004). Dalam pengukuran membandingkan keluaran dan masukan, maka akan adanya perbaikan efisiensi yang dapat dilakukan dengan cara, meningkatkan output pada tingkat input yang sama, meningkatkan output dalam promosi yang lebih besar dari pada promosi peningkatan input, menurunkan input pada tingkatan output yang sama, dan menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output.

Mengukur kinerja dalam pengelolaan dalam efisiensi dapat dibedakan dengan, alokasi terkait dalam kemampuan mendayagunakansumber daya input pada tingkat efektivitas optimal dan teknis manajerial dalam kemampuan mendayagunakan sumber daya input kepada tingkatan output tertentu.

2.4.5 Pengertian Efektivitas Dalam Kinerja *Value For Money*, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas bisa disebut juga pengukuran untuk layak atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif, maka efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang akan di keluarkan untuk mencapai tujuan. Biaya pengeluaran di perbolehkan lebih dari yang telah di anggarkan bahkan di perbolehkan tiga kali lebih besar dari yang di anggarkan. Efektifitas akan melihat suatu program atau kegiatan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004).

Terkait dengan adanya hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya yang dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan akan semakin efektif organisasi suatu program atau kegiatan. Efektifitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome), (Mahmudi, 2011).

2.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut spesifikasi tata ruang adalah keadaan, ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudahan seseorang, dan kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan aman dan nyaman serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang atau lebih dalam memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, dan sebagainya (Permendagri No. 21 Tahun 2010).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang di buat oleh unit pemerintah. Keterbukaan informasi publik dapat di lihat dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan setiap informasi untuk publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat atau pengguna informasi publik. Setiap informasi dapat di peroleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan caranya sederhana (Linda, 2018).

Menurut Sande (2013), pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Keterbukaan, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasi secara terbuka melalui media massa.

2. Kemudahan, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan mengakses kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
3. *Accesible*, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

Aksesibilitas dalam organisasi dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk:

- a) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

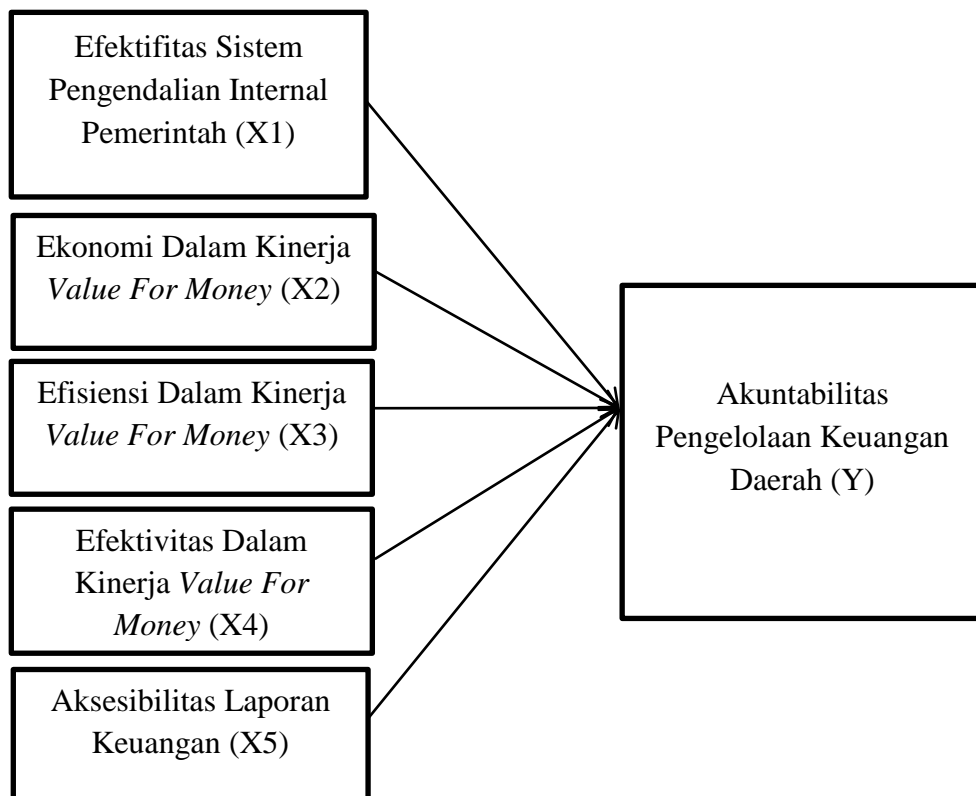
No.	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Anesa Pramudita, (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Value For Money Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan, <i>Value for money</i> tidak berpengaruh terhadap

		Kabupaten Ponorogo)	akuntabilitas pengelolaan keungan daerah.
2.	Septa Purwaningrum (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo.	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultat atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengolaan keuangan.
3.	Ma'arif Ari Varida Linda (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Kabupaten Ponorogo.	Secara parsial penyajian lapora keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Esa Putra Perdana (2019)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Efektivitas System Pengendalian Internal Pemerintah Dan

		dan Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah, Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi)	Kinerja <i>Value For Money</i> berpengaruh secara signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.	Lia Darna Riska (2020)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh	Secara parsial komitmen organisasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan, Transparansi dan efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.7 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Hubungan Antara Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kurniawan Arif (2019), menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Sehingga Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dan semakin efektif sistem pengendalian internal pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Ramon, 2014; Primayani dkk, 2014; dan Mulyani, 2020). Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Azizah, 2015).

Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

H1: Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.2 Hubungan Antara Pengaruh Ekonomi Dalam Kinerja *Value For Money* Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugikan. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya (Mardiasmo, 2002). Pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Maka dari itu ekonomi dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Memperoleh *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah semakin konsistennya dalam memenuhi ekspektasi pelanggan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah. Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Primayani, dkk, 2014).

Kinerja *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

H2: Ekonomi Dalam Kinerja *Value For Money* Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.3 Hubungan Antara Pengaruh Efisien Dalam Kinerja *Value For Money* Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugikan.

Efisien artinya daya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal. Pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan

perbandingan *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Maka dari itu efisiensi dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dikarenakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu dalam memenuhi ekspektasi pelanggan atau masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah. Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Primayani, dkk, 2014).

Kinerja *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

H3: Efisiensi Dalam Kinerja *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.8.4 Hubungan Antara Pengaruh Efektivitas Dalam Kinerja *Value For Money* Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugikan.

Efektifitas artinya berhasil guna dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara

sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Maka dari itu efektivitas dalam kinerja *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan semakin konsistennya dalam memenuhi ekspektasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah. Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Primayani, dkk, 2014).

Efektivitas kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

H4: Efektivitas Dalam Kinerja *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.8.5 Hubungan Antara Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kurniawati (2016), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tergantung kepada aksesibilitas laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal jika pemerintah tidak memberikan akses laporan keuangan daerah tersebut. Jika akses laporan keuangan daerah yang semakin mudah maka akan semakin baik untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang efektif, pemerintahan dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan dan menciptakan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat. Aksesibilitas tidak berpengaruh dan juga berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah, (Menurut Varida, 2018). Maka dari itu peneliti menyatakan bahwa aksesibilitas akan berjalan jika pemerintah memberikan akses terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui pemasukan dan pengeluaran apa saja yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Peneliti menyatakan bahwa:

H5: Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu berdasarkan kuesioner langsung kepada responden pada instansi yang di tetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan agar dapat mendukung penelitian ini. Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

Kuesioner, Sugiyono (2015) menyatakan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberikan sebuah pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami dengan tepat variabel yang akan di ukur dan memahami apa yang di inginkan responden tersebut. Jenis kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah tersedia jawabannya. Alasan peneliti menggunakan jenis kuesioner ini agar memberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan yang peneliti berikan kepada responden dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data terhadap angket yang telah terkumpul.

3.3 Populasi dan Sampel

Berdasarkan judul yang telah peneliti angkat, maka penulis menentukan populasi dan sampel sebagai berikut:

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Noch & Husein, 2016). Populasi yang di pakai dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya staf bagian keuangan dan pejabat daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan di OPD Kabupaten Lampung Tengah.

Daftar OPD Kabupaten Lampung Tengah

No	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Badan penelitian dan pengembangan daerah
2.	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
3.	Badan penanggulangan bencana daerah
4.	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
5.	Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
6.	Badan perencanaan dan pembangunan daerah
7.	Dinas binamarga
8.	Dinas kependudukan dan catatan sipil
9.	Dinas kesehatan
10.	Dinas ketahanan pangan
11.	Dinas koperasi
12.	Dinas pariwisata
13.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
14.	Dinas pendidikan dan kebudayaan
15.	Dinas perdagangan
16.	Dinas perhubungan
17.	Dinas perindustrian
18.	Dinas perternakan dan perkekebunan
19.	Dinas perpustakaan dan kearsipan

20.	Dinas sosial
21.	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
22.	Inspektorat
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
24.	Sekretariat Daerah

<https://web.lampungengahkab.go.id/>

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

Dinas yang terhubung dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

1. Kepala Dinas, Kepala Bagian/Bidang dan Staff yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Alasan Peneliti dalam memilih kriteria ini yaitu di karenakan kriteria tersebut tertuju langsung dalam proses kegiatan keuangan pada organisasi pemerintahan daerah sehingga mereka lebih mengetahui informasi keuangan di instansi tersebut dan setiap pegawai yang sudah bekerja minimal 1 tahun dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam bidangnya.

Teknik yang di tentukan untuk pengumpulan data sampel penelitian ini *Convenience Sampling* dengan menyebarkan kuesioner yang akan di tunjukan kepada pihak yang terkait untuk dapat mengetahui data yang ingin diketahui dan menganalisa jawaban dari responden untuk mengetahui pengaruh di dalam penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian terdapat beberapa variabel yang harus di tetapkan dengan jelas sebelum mulai mengumpulkan data.

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel bebas menurut Sugiyono (2015), variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas:

A. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator proses untuk menilai efektivitas suatu sistem pengendalian internal pemerintah dengan melihat pencapaian tujuan pengendalian utama dan mengusulkan cara penilaian yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas tersebut. Penilaian atas tujuan pengendalian utama di lakukan secara holistik yaitu penilaian tujuan pengendalian utama tidak di lakukan berdasarkan penilaian setiap unsur SPIP melainkan berdasarkan penilaian keseluruhan unsur SPIP.

Cara penilaian keandalan SPIP yang diusulkan adalah dengan menggunakan beberapa langkah yaitu meliputi identifikasi pengendalian utama, pengujian pengendalian utama dan evaluasi pengendalian utama. Untuk memberikan keyakinan dalam indikator bahwa teknik penilaian, dan instrumen yang digunakan dalam teknik pengujian *valid* dan handal. (bpkp.go.id/spip/konten/)

B. Ekonomi, Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money

Menurut Mardiasmo (2009), tuntutan masyarakat dalam *Value For Money*, yaitu *ekonomis* (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, *efisiensi* dalam arti penggunaan di minimalkan dan hasilnya di maksimalkan, dan efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value For Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.

C. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan dalam mengakses untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan setiap informasi untuk publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau pengguna informasi publik. Setiap informasi dapat di peroleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan caranya sederhana (Linda, 2018).

D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik (Wahyuni dkk, 2014). Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulan. Operasional variabel di perlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan penulis yaitu “Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kinerja Value For Money dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terkait (*dependent variable*).

1. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator proses untuk menilai efektivitas suatu sistem pengendalian internal pemerintah dengan melihat pencapaian tujuan pengendalian utama dan mengusulkan cara penilaian yang dapat di gunakan untuk melihat efektivitas tersebut. Penilaian atas tujuan pengendalian utama di lakukan secara holistik yaitu penilaian tujuan pengendalian utama tidak di lakukan berdasarkan penilaian setiap unsur SPIP melainkan berdasarkan penilaian keseluruhan unsur SPIP.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal

Indikator yang dapat disarankan untuk di gunakan dalam menilai keandalan SPIP meliputi atribut-atribut dokumentasi, kesadaran atau pemahaman, sikap dan tindakan, prosedur pengendalian, serta monitoring. Cara penilaian keandalan SPIP yang di usulkan adalah dengan menggunakan beberapa langkah yaitu meliputi identifikasi pengendalian utama, pengujian pengendalian utama, dan evaluasi pengendalian utama. Untuk memberikan keyakinan dalam indikator bahwa teknik penilaian, dan instrumen yang digunakan dalam teknik pengujian *valid* dan handal. (bkp.go.id/spip/konten/)

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengembangkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), Menurut Bastian(2006).

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang di butuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang di hadapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang di timbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap kegiatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Cara pengukuran kinerja yang bisa di gunakan, anatar lain metode *balance score card* dan metode *value for money*. Dalam metode *balance score card* memiliki empat perspektif yang di nilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses internal (*internal*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*). Sedangkan metode *value for money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

3. Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money

Peranan indikator kinerja pada *Value For Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.

Indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (*ekonomis dan efisiensi*). *Ekonomis* artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending les*).
2. *Efisiensi* artinya *output* tertentu dapat di capai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
3. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X5)

Indikator ini memiliki tiga yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan (Wahida, 2015):

1. Laporan keuangan di publikasi secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak *eksternal* dapat melihat secara langsung dari media cetak.
2. Mudah di akses pihak *eksternal* untuk mendapatkan informasi laporan keuangan melalui internet (website).
3. Ketersediaan informasi laporan keuangan yang di publikasi secara lengkap di sampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.

3.5 Metode Analisis Data

Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden/sumber data lain terkumpul. Kegiatan didalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, melakukan tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diujikan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistika dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 25.0 for Windows*.

Dalam penelitian ini alat ukur yang di gunakan adalah kuesioner. Untuk mencari validitas, harus mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan (Sugiyono, 2017).

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015) melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Ada beberapa urutan yang dilakukan, yaitu:

Melakukan pengumpulan data, menentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan di teliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dan jawaban atau kuesioner untuk menentukan kuesioner tersebut, penulis menggunakan *skala likert*.

Selanjutnya kuesioner di sebar ke instansi yang telah di pilih dengan bagian yang telah di terapkan, setelah itu di kumpulkan kembali kuesioner tersebut yang telah di isi oleh responden. Setiap item dari kuesioner memiliki nilai/skor 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan skor skala likert adalah:

Tabel 3.2 Skor Skala Likert

No.	Kriteria	Skor Item
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Jika data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk mengetahui nilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari setiap variabel.

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas di lakukan untuk mengukur apakah data yang telah di dapat setelah penelitian merupakan data yang valid dari alat ukur yang di gunakan (kuesioner). Metode yang di gunakan adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau r hitung dari variabel penelitian dengan nilai r tabel. Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid.
- b. Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas di lakukan untuk melihat apakah alat ukur yang di gunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pertanyaan yang telah di nyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha*, Ghozali (2001). Apabila koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,57 maka instrumen yang di gunakan di katakan reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011) menjelaskan bahwa uji normalitas di lakukan untuk menguji apakah model regresi variabel data yang normal yaitu data yang di sribusi normalnya membentuk garis yang mengikuti arah kurva normal. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data di nyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data di nyatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikorealitas

Multikorealitas adalah situasi di mana ada korelasi antara variabel bebas (*independent*) yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinearitas terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel *independent* dalam model regresi. Untuk mendeteksi tidak adanya kasus multikorealitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menentukan adanya multikorealitas adalah nilai *tolerance* >0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedasitas

Dalam Ghozali (2011) menjelaskan bahwa tujuan dari uji heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari variansi residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas.

1.5.2 Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α : Konstanta

β_1-5 : Koefisien Regresi

X1 : Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X2 : Ekonomi Kinerja *Value For Money*

X3 : Efisiensi Kinerja *Value For Money*

X4 : Efektivitas Kinerja *Value For Money*

X5 : Aksesibilitas Laporan Keuangan

E : Error (Kesalahan)

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Koefisien Determinan (R²)

Koefisien Determinan (R²) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tersebut.

3.6.2 Uji F

Menurut Ghozali (2011) uji statistik F (*uji signifikansi simultan*) menunjukkan pada dasarnya apakah semua variabel independen (bebas) yang di masukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* (terikat). Uji F dilakukan dengan pendekatan *pearson correlation*, bila besarnya nilai probabilitas atau sig. (*2 tailed*) lebih kecil dari 0,05 maka H₀ ditolak.

3.6.3 Uji T

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Dalam penelitian ini menggunakan α sebesar 5%, yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

1. Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Pejabat Daerah di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Data primer dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menyebarkan 72 Kuesioner. Kemudian sampel yang telah di pilih, selanjutnya akan di gunakan untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, bidang pendidikan dan pengalaman responden.

Tabel 4.1 Data Hasil Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar ke OPD Kab. Lampung Tengah	72
2	Kuesioner yang kembali	57
3	Kuesioner yang tidak kembali	15
4	Kuesioner yang cacat / rusak	0
5	Kesioner yang dijadikan sampel	57

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.1 dapat di lihat bahwa kuisioner yang telah di sebar sebanyak 72 dan kuesioner yang kembali 57, sedangkan untuk kuesioner yang tidak kembli dan kuesioner yang tidak dapat diolah adalah 15.

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia Responden

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	<30	6	10,5	10,5	10,5
	31-40	17	29,8	29,8	40,4
Valid	41-50	25	43,9	43,9	84,2
	>50	9	15,8	15,8	100,0
	Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Table 4.2 menunjukkan responden yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar 10,5% berusia <30 tahun, 29,8% berusia 31-40 tahun, 43,9% berusia 41-50 tahun, 15,8% berusia >50 tahun. Mayoritas responden yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah berusia 41-50 tahun atau 43,9%.

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	28	49,1	49,1	49,1
	Perempuan	29	50,9	50,9	100,0
	Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data yang di sajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 28 Responden yaitu 49,1% responden berjenis kelamin laki laki dan 29 Responden yaitu 50,9%. Resondn berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Responden**Pendidikan Terakhir**

	Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA/Sederajat	3	5,3	5,3	5,3
Diploma I-III	6	10,5	10,5	15,8
Valid S1/Diploma IV	29	50,9	50,9	66,7
S2	19	33,3	33,3	100,0
Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan table 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan Strata Satu (S1) dengan jumlah 29 responden yaitu 50,9%. Sisanya sebesar 5,3% atau sebanyak 3 responden yang berpendidikan SMA, 10,5% atau sebanyak 6 responden yang berpendidikan DIPLOMA I-III, dan 33,3% atau sebanyak 19 responden yang berpendidikan (S2).

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan**Bidang Pendidikan**

		Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ekonomi	25	43,9	46,3	46,3
	Non Ekonomi	29	50,9	53,7	100,0
	Total	54	94,7	100,0	
Missing	System	3	5,3		
Total		57	100,0		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan table 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner dibidang non ekonomi sebesar 50,9% yaitu 29 responden, dan untuk bidang ekonomi sebesar 43,9% yaitu 25 responden. 3 responden tidak memiliki pendidikan lanjut dikarenakan pendidikan terakhir yaitu SMA.

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Terlibat Pengelolaan Keuangan

Pengalaman				
	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diklat Teknis	12	21,1	21,1	21,1
Bimtek	24	42,1	42,1	63,2
Valid Sosialisasi Pengelolaan Keuangan	21	36,8	36,8	100,0
Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan table 4.6 dapat di ketahui bahwa responden memiliki pengalaman terlibat pngelolaan keuangan yaitu sebesar 21,1% yaitu 12 responden yang mengikuti Diklat Teknis, 42,1% yaitu 24 responden yang mengikuti Bimtek dan 36,8% yaitu 21 responden yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan. Mayoritas pengalaman yang sering dilakukan oleh responden adalah Bimtek, rata-rata banyak yang sudah mengikuti bimtek.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum atau deskripsi dari suatu data yang di lihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing – masing variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, ekonomi dalam kinerja *value for money*, efisiensi dalam kinerja *value for money*, efektivitas dalam kinerja *value for money*, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah yang akan di uji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	57	4	5	4.61	.491
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.37	.522
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.39	.526
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.37	.522
Aksesibilitas Laporan Keuangan	57	3	5	4.37	.522
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	57	4	5	4.46	.503
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.7 dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Diketahui Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 4 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,61 dan standar deviasi sebesar 0,491.
2. Diketahui Ekonomi Kinerja Value For Money (X2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 3 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,37 dan standar deviasi sebesar 0,522.
3. Diketahui Efisiensi Kinerja Value For Money (X3) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 3 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,526.

4. Diketahui Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money (X4) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 3 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,37 dan standar deviasi sebesar 0,522.

5. Diketahui Aksesibilitas Laporan Keuangan (X5) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 3 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,37 dan standar deviasi sebesar 0,522.

6. Diketahui Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan jumlah responden (N) sebanyak 57 responden dengan skor minimum adalah 4 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,46 dan standar deviasi sebesar 0,503.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Dalam pengujian kuesioner ini melibatkan 57 responden. Hasil dari uji validitas terhadap pertanyaan dari variabel efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah (X1), ekonomi kinerja value for money (X2), efisiensi kinerja value for money (X3), efektivitas kinerja value for money (X4), aksesibilitas laporan keuangan (X5), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	Koefisien korelasi	r_{tabel} (n=57)	Keterangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0,772	0,221	Valid
	X1.2	0,758	0,221	Valid
	X1.3	0,800	0,221	Valid
	X1.4	0,842	0,221	Valid
	X1.5	0,777	0,221	Valid
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	X2.1	0,648	0,221	Valid
	X2.2	0,706	0,221	Valid
	X2.3	0,769	0,221	Valid
	X2.4	0,855	0,221	Valid
	X2.5	0,636	0,221	Valid

Efisiensi	X3.1	0,656	0,221	Valid
Dalam	X3.2	0,453	0,221	Valid
Kinerja	X3.3	0,738	0,221	Valid
Value For	X3.4	0,816	0,221	Valid
Money	X3.5	0,806	0,221	Valid
Efektivitas	X4.1	0,679	0,221	Valid
Dalam	X4.2	0,751	0,221	Valid
Kinerja	X4.3	0,654	0,221	Valid
Value For	X4.4	0,860	0,221	Valid
Money	X4.5	0,787	0,221	Valid
Aksesibilitas	X5.1	0,746	0,221	Valid
Laporan	X5.2	0,814	0,221	Valid
Keuangan	X5.3	0,794	0,221	Valid
	X5.4	0,551	0,221	Valid
	X5.5	0,786	0,221	Valid
Akuntabilitas	Y1.1	0,753	0,221	Valid
Pengelolaan	Y1.2	0,847	0,221	Valid
Keuangan	Y1.3	0,846	0,221	Valid
Daerah	Y1.4	0,672	0,221	Valid
	Y1.5	0,746	0,221	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Hasil dari perhitungan Uji Validitas sebagaimana tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua nilai r-tabel pada nilai signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam angket penelitian ini valid, dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.2.2.2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha*. Uji signifikan dilakukan pada taraf $\alpha = 0,57$. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari *r*-tabel (0,221)

Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach'c Alpha	Keterangan
X1	0,917	Reliabel
X2	0,910	Reliabel
X3	0,910	Reliabel
X4	0,918	Reliabel
X5	0,924	Reliabel
Y	0,909	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,57 yang berarti telah reliabel, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian tersebut.

4.2.3 Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,99364559
	Absolute	,108
Most Extreme Differences	Positive	,052
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		,813
Asymp. Sig. (2-tailed)		,523

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov* yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa dependen K-Z sebesar 0,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,523. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa angka signifikan (sig) pada uji *kolmogrov-smirnov* diperoleh $0,523 > 0,05$ artinya data terdistribusi secara normal.

4.2.3.2 Uji Multikorelitas

Uji Multikorelitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikorelitas dengan melihat dari besarnya nilai korelasi. Jika nilai korelasi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikorelitas. Hasil uji multikorelitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikorelitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,438	2,285
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,274	3,653
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,252	3,970
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	,459	2,177
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,473	2,115

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menyatakan bahwa nilai *tolerance* dari keempat variable independen $> 0,10$ dan VIF < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terbebas dari masalah dan dapat untuk digunakan uji multikorelitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama (*constan*). Dasar pengambilan keputusan Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah jika nilai signifikan > 0.05 , maka dapat di katakan bahwa data 57 yang sudah di uji tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.
(Constant)	,552
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,347
1 Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,845
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,097
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	,142
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,245

a. Dependent Variable: RES4

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, ekonomi dalam kinerja *value for money*, efisiensi dalam kinerja *value for money*, efektivitas dalam kinerja *value for money*, dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05 yang berarti layak untuk digunakan.

4.2.4 Analisis Regresi Linier

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linier berganda dengan program SPSS disajikan pada tabel 4.13

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,646	1,079		-,598	,552
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,060	,063	,187	,948	,347
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,015	,077	,049	,196	,845
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,144	,085	,438	1,691	,097
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	-,094	,063	-,286	-1,492	,142
Aksesibilitas Laporan Keuangan	-,064	,054	-,222	-1,175	,245

a. Dependent Variable: RES4
Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 Uji Regresi Linier Berganda di atas yaitu model persamaan regresi yang di gunakan sebagai berikut:

$$Y = -0,646 + 0,060 X1 + -0,015 X2 + 0,144 X3 + -0,094 X4 + -0,064 X5$$

Keterangan :

- Y : Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X1 : Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
X2 : Ekonomi Kinerja *Value For Money*

- X3 : Efisiensi Kinerja *Value For Money*
 X4 : Efektivitas Kinerja *Value For Money*
 X5 : Aksesibilitas Laporan Keuangan
 E : Error

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinan (R²)

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 ^a	.750	.725	1,041

a. Predictors: (*Constant*), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Dalam Kinerja *Value For Money*, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Ekonomi Dalam Kinerja *Value For Money*, Efisiensi Dalam Kinerja *Value For Money*

Dari output di atas, terdapat nilai adjusted R square (koefisien determinasi) sebesar 0,725 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 72,5%.

4.3.2 Uji F

Uji statistik F (*uji signifikan simultan*) menyatakan pada dasarnya semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan kedalam model apakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali 2013). Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini

Tabel 4.15 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,199	5	,640	1,612	,174 ^b
	Residual	20,244	51	,397		
	Total	23,443	56			

a. Dependent Variable: RES4

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money, Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money

Berdasarkan tabel 4.15 menyatakan bahwa *F hitung* sebesar 1,612 dengan tingkat signifikan 0,174. Model penelitian ini dapat digunakan karena nilai (sig) 0,174 < 0,05.

4.3.1 Uji T

Uji T digunakan untuk menjawab hipotesis yang disampaikan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, jika:

Ha diterima dan Ho ditolak apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} < 0,05$

Ha ditolak dan Ho diterima apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} > 0,05$

Hasil Uji T dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,496	1,783		
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,362	,104	,369	3,483	,001
Ekonomi Kinerja Value For Money	,152	,127	,160	1,198	,237
Efisiensi Kinerja Value For Money	-,118	,141	-,117	-,836	,407
Efektivitas Kinerja Value For Money	,383	,104	,382	3,696	,001
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,186	,090	,211	2,071	,043

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Hipotesis pertama (H_{a1}) dalam penelitian ini yaitu efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel (X_1). Hasil pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka jawaban hipotesis pada X_1 yaitu H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak, maka dinyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Hipotesis kedua (H_{a2}) dalam penelitian ini yaitu ekonomi kinerja *value for money* sebagai variabel (X_2). Hasil pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,237 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis pada X_2 yaitu H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima, maka dinyatakan bahwa ekonomi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Hipotesis ketiga (H_{a3}) dalam penelitian ini yaitu efisiensi kinerja *value for money* sebagai variabel (X_3). Hasil pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,407 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis pada X_3 yaitu H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima, maka dinyatakan bahwa efisiensi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Hipotesis keempat (H_{a4}) dalam penelitian ini yaitu efektivitas kinerja *value for money* sebagai variabel (X_4). Hasil pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak, maka dinyatakan bahwa efektivitas kinerja *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Hipotesis kelima (H_{a5}) dalam penelitian ini adalah keadilan prosedural yaitu aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel (X_5). Hasil pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a5} diterima dan H_{o5} ditolak, maka dinyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian H_1 menyatakan bahwa dalam penelitian ini efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah. Sistem pengendalian internal sendiri untuk di Pemerintah kabupaten lampung tengah masih belum maksimal ditetapkan dan kurangnya pengawasan untuk para pegawai/staf-staf yang masih belum menyadari tanggung jawabnya masing-masing.

Maka dari itu hasil pengujian bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian yang menemukan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Ramon, 2014; Primayani dkk, 2014; dan Mulyani, 2017).

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Azizah, 2018).

Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

4.4.2 Pengaruh Ekonomi Dalam Kinerja *Value For Money* Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian H_2 menyatakan bahwa dalam penelitian ini ekonomi dalam kinerja *value for money*. Menyatakan bahwa ekonomi dalam kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah. Banyak dari kepala-kepala yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah menyetujui bahwa adanya perubahan yang ada didalam pemeritahan di kabupaten lampung tengah.

Maka dari itu hasil pengujian ini menemukan beberapa uji yang sama yaitu Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah.

Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Primayani, dkk, 2014).

Kinerja *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

4.4.3 Pengaruh Efisien Dalam Kinerja Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian H_3 menyatakan bahwa dalam penelitian ini efisiensi dalam kinerja *value for money*. Menyatakan bahwa efisiensi dalam kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah. Banyak dari kepala-kepala yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah menyetujui bahwa adanya perubahan yang ada didalam pemeritahan di kabupaten lampung tengah.

Maka dari itu hasil pengujian ini menemukan beberapa uji yang sama yaitu Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah.

Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah(Primayani, dkk, 2014).

Kinerja *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

4.4.4 Pengaruh Efektivitas Dalam Kinerja *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian H_4 menyatakan bahwa dalam penelitian ini efektivitas dalam kinerja *value for money*. Menyatakan bahwa efektivitas dalam kinerja *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah. Banyak dari kepala-kepala yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah menyetujui bahwa adanya perubahan yang ada didalam pemeritahan di kabupaten lampung tengah.

Maka dari itu hasil pengujian bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian yang menemukan bahwa Pemakaian konsep *value for money* juga dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan *output* yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan dengan biaya yang terendah.

Kinerja *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Primayani, dkk, 2014).

Efektivitas Kinerja *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Perdana, 2019).

4.4.5 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian H_5 menyatakan bahwa dalam penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan. Menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di organisasi perangkat daerah di kabupaten lampung tengah. Banyak dari kepala-kepala yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah menyetujui bahwa adanya perubahan yang ada didalam pemeritahan di kabupaten lampung tengah.

Maka dari itu hasil pengujian ini menemukan beberapa uji yang sama yaitu (Hehanussa, 2015) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dan adapula yang bertolak belakang menurut (Linda, 2018) menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh dan juga tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data primer yang diolah dari melakukan penyebaran kuesioner di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang pada tahun 2021 maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel reliabel dan valid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang dengan jumlah sampel 57 responden dapat ditarik kesimpulan:

1. H₁ ditolak, artinya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. H₂ diterima, artinya ekonomi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. H₃ diterima, artinya efisiensi kinerja *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. H₄ ditolak, artinya efektivitas kinerja *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. H₅ diterima, artinya aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode survey yang menggunakan kuesioner yang tidak di lengkapi dengan wawancara atau observasi langsung ke lapangan. Hal ini mengakibatkan kurang detailnya data yang diperoleh sehingga pembahasan menjadi kurang mendalam.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada persepsi pegawai di Organisasi Perangkat Daerah kabupaten lampung tengah, hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Penelitian ini diambil saat sedang pandemi Covid-19 maka dari itu banyak Organisasi Perangkat Daerah kabupaten lampung tengah yang tidak menerima pendatang/mahasiswa yang sedang melakukan riset/penelitian dikarenakan banyaknya yang terpapar Covid-19.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih merata sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih mencerminkan realita.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independent lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden. Tidak hanya di bagian keuangan saja melainkan bisa ke bagian yang lain, karena bentuk kecurangan tidak bisa di lakukan pada satu bagian saja, tetapi akan merambah ke bagian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Aisyah (2021). “Pengaruh Good Governance Pada Pengelolaan Aset Tetap Penerimaan Daerah”. *Majalah Media Perencanaan* 2 (1), 145-152 (2021).
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan) Edisi Kelima Belas*. Jakarta: Erlangga
- Auditya, Lucy, Husaini Lismawati (2013). “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal fairness* 3 (1), 21-41, (2013).
- Azizah, Nur, Junaidi, dan Achdiar Redy Setiawan (2015). “Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal riset dan aplikasi: akuntansi dan manajemen, Vol. 1 (2) (2015)*.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- bcpk.go.id/spip/konten/
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. (edisi ketiga)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardiningsih, Pancawati, (2019). “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)”. *Jurnal Akuntansi Syariah Vol. 2 (1), 21-42 (2009)*.
- Hehanussa, Salomi J. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon”. *Jurnal Ekonomi Vol 2, No 1. Universitas Sultan Agung*.
- Ichlas, Muhammad, Basri, Hasan dan Arfan, Muhammad. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Kurniawati, Maria Magdalena Hesti. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)”. *Jurnal Akuntansi. Universitas Jember*.
- Linda, Ma'arif Ari Varida (2018). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Dan Badan Di

Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi (S1) tesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.*

Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua.* Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Mahmudi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: UII Press.

Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga.* BPFE, Yogyakarta.

Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo, (2004). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, (2005). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2.* Yogyakarta: Andi

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mulyadi, (2016). *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat.

Mulyana, Budi. (2006). “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1. Mei 2006.*

Mulyani, Erly dan M. Saferi (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017)”. Universitas Negeri Padang, *Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Eksplorasi Akuntansi.*

- Noch, M. Y. & Husein, S., (2016). *Metodelogi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Muhdi B. H. Ibrahim (Ed), E-JRA (Catatan PE). Jayapura: Madenatera Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. dkk. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba empat.
- Nurmuthmainnah, Wahida. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Perdana, Esa Putra, Liza Laila Nurwulan (2019). “Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kinerja Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah, Dan Inspektorat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)”. Perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis unpas (2019).
- Peraturan Pemerintah pasal 3 No. 60 Tahun 2008 tentang Pencapaian Pengelolaan Keuangan Negara Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kemendagri Dan Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Permenpan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah`

Pramudita, Anesa. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Value For Money dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo). *Skripsi. Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.*

Primayani, Putu Riana dkk. (2014). “Pengaruh Pengendalian Internal Value For Money Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung)”. *E-Jurnal SI Ak Vol.2, No.(1) Tahun (2014). Universitas Pendidikan Ganesha.*

Purwaningrum, Septa (2018). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi (SI) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.*

Raharjo, Eko (2007). “Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi”. *Journal ISSN (1907-6304) Tahun (2007).*

- Rohman, Abdul. (2009). “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No 1 Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang*
- Ramon, Dolly (2014). “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)”. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta. Jurnal akuntansi Vol. 2 (2) (2014).*
- Riska, Lia Dharma (2020). “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh”. *Skripsi (S1), UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.*
- Sayuti, dkk (2018). “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Bappeda Kabupaten Gowa”. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Et, al. ATESTASI Vol. 1 No. (1) (2018).*
- Sande, Peggy. (2013). “Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Study Empiris pada Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat)”. *Skripsi, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.*
- Somad, Abdus. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang).” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA). ISSN: 2337- 56xx. Volume:xx, Nomor: xx. Hlm. 1-20*

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

UU No. 1 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1

UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan setiap informasi untuk publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau pengguna informasi publik

Wahida, N. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.” *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar*.

Wahyuni, Putu Sri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati, (2014). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung)”. *e-Journal unp S1 Ak Vol. 2 (1) Tahun (2014)*.

www.lampungengahkab.go.id

Lampiran

Tabel 4.1 Data Hasil Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar ke OPD Kab. Lampung Tengah	72
2	Kuesioner yang kembali	57
3	Kuesioner yang tidak kembali	15
4	Kuesioner yang cacat / rusak	0
5	Kesioner yang dijadikan sampel	57

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia Responden

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30	6	10,5	10,5	10,5
31-40	17	29,8	29,8	40,4
Valid 41-50	25	43,9	43,9	84,2
>50	9	15,8	15,8	100,0
Total	57	100,0	100,0	

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			
		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	28	49,1	49,1	49,1
	Perempuan	29	50,9	50,9	100,0
	Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Responden

		Pendidikan Terakhir			
		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	3	5,3	5,3	5,3
	Diploma I-III	6	10,5	10,5	15,8
	S1/Diploma IV	29	50,9	50,9	66,7
	S2	19	33,3	33,3	100,0
	Total	57	100,0	100,0	

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ekonomi	25	43,9	46,3	46,3
	Non Ekonomi	29	50,9	53,7	100,0
	Total	54	94,7	100,0	
Missing	System	3	5,3		
Total		57	100,0		

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Terlibat Pengelolaan Keuangan

Pengalaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diklat Teknis	12	21,1	21,1	21,1
	Bimtek	24	42,1	42,1	63,2
	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan	21	36,8	36,8	100,0
	Total	57	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	57	4	5	4.61	.491
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.37	.522
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.39	.526
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	57	3	5	4.37	.522
Aksesibilitas Laporan Keuangan	57	3	5	4.37	.522
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	57	4	5	4.46	.503
Valid N (listwise)	57				

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	Koefisien korelasi	r_{tabel} (n=57)	Keterangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0,772	0,221	Valid
	X1.2	0,758	0,221	Valid
	X1.3	0,800	0,221	Valid
	X1.4	0,842	0,221	Valid
	X1.5	0,777	0,221	Valid
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	X2.1	0,648	0,221	Valid
	X2.2	0,706	0,221	Valid
	X2.3	0,769	0,221	Valid

	X2.4	0,855	0,221	Valid
	X2.5	0,636	0,221	Valid
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	X3.1	0,656	0,221	Valid
	X3.2	0,453	0,221	Valid
	X3.3	0,738	0,221	Valid
	X3.4	0,816	0,221	Valid
	X3.5	0,806	0,221	Valid
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	X4.1	0,679	0,221	Valid
	X4.2	0,751	0,221	Valid
	X4.3	0,654	0,221	Valid
	X4.4	0,860	0,221	Valid
	X4.5	0,787	0,221	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X5.1	0,746	0,221	Valid
	X5.2	0,814	0,221	Valid
	X5.3	0,794	0,221	Valid
	X5.4	0,551	0,221	Valid
	X5.5	0,786	0,221	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Y1.1	0,753	0,221	Valid
	Y1.2	0,847	0,221	Valid
	Y1.3	0,846	0,221	Valid
	Y1.4	0,672	0,221	Valid
	Y1.5	0,746	0,221	Valid

Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach'c Alpha	Keterangan
X1	0,917	Reliabel
X2	0,910	Reliabel
X3	0,910	Reliabel
X4	0,918	Reliabel
X5	0,924	Reliabel
Y	0,909	Reliabel

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,99364559
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,108
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		,813
Asymp. Sig. (2-tailed)		,523

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikorelitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,438	2,285
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,274	3,653
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,252	3,970
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	,459	2,177
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,473	2,115

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Sig.
(Constant)	,552
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,347
1 Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,845
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,097
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	,142
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,245

a. Dependent Variable: RES4

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,646	1,079		-,598	,552
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,060	,063	,187	,948	,347
Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money	,015	,077	,049	,196	,845
Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money	,144	,085	,438	1,691	,097
Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money	-,094	,063	-,286	-1,492	,142
Aksesibilitas Laporan Keuangan	-,064	,054	-,222	-1,175	,245

a. Dependent Variable: RES4

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,866 ^a	,750	,725	1,041

a. Predictors: (*Constant*), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money, Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money

Tabel 4.15 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,199	5	,640	1,612	,174 ^b
	Residual	20,244	51	,397		
	Total	23,443	56			

a. Dependent Variable: RES4

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Dalam Kinerja Value For Money, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Ekonomi Dalam Kinerja Value For Money, Efisiensi Dalam Kinerja Value For Money

Tabel 4.16 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,496	1,783		,278	,782
	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,362	,104	,369	3,483	,001
	Ekonomi Kinerja Value For Money	,152	,127	,160	1,198	,237
	Efisiensi Kinerja Value For Money	-,118	,141	-,117	-,836	,407
	Efektivitas Kinerja Value For Money	,383	,104	,382	3,696	,001
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,186	,090	,211	2,071	,043

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah